

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di suatu negara yang sedang berkembang maupun yang sudah maju dalam mewujudkan penduduk yang sejahtera maka harus dilakukan proses pembangunan. Ada 3 landasan proses pembangunan trilogi yaitu pembangunan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan stabilitas. Kualitas sumber daya manusia mempunyai andil besar dalam pembangunan ekonomi di suatu negara maupun wilayah yaitu sebagai paradigma pembangunan sebagai tujuan atas tercapainya kegiatan pembangunan. Oleh karena itu kualitas sumberdaya manusia sebagai penentu/perencana pembangunan suatu negara harus disertai dengan pembangunan manusia. Melakukan pembangunan manusia yaitu dengan pembangunan di segala aspek bidang pendidikan, kesehatan, serta pelayanan umum. Dengan adanya pemerataan pembangunan, terdapat adanya jaminan bahwa semua penduduk merasakan hasil dari pembangunan tersebut. (Ardiansyah Widyaningsih:2014)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang tidak dapat mengukur semua dimensi pembangunan manusia tetapi mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mampu mencerminkan kemampuan dasar penduduk, ketiga kemampuan dasar penduduk yaitu umur panjang dan sehat, berpengetahuan dan berkecakupan, serta akses terhadap sumberdaya yang dibutuhkan untuk

mencapai hidup yang layak. UNDP mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk dalam hal pendapatan, kesehatan, pendidikan lingkungan fisik dan sebagainya. Empat hal pokok yang perlu diperhatikan dalam pembangunan manusia adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan, pemberdayaan (UNDP:1995).

**Tabel 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Provinsi di Indonesia**  
**Tahun 2012 – 2017**

Tahun	IPM
2012	67,7
2013	68,31
2014	68,9
2015	69,55
2016	70,18
2017	70,81

Sumber : Badan Pusat Statistik (Publikasi)

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia meningkat disetiap tahun. Pada tahun 2013 meningkat sebesar 0,61 dari tahun 2012, untuk tahun 2014 meningkat sebesar 0,59 dari tahun 2013, dan untuk tahun 2015 sebesar 0,65 dari tahun 2014, untuk tahun 2016 meningkat sebesar 0,63 dari tahun 2015 dan untuk tahun 2017 sebesar 0,70 dari tahun 2016. Dengan demikian selama kurun waktu 2012–2017 Indeks Pembangunan di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya.

Pembangunan manusia di Indonesia sesungguhnya sudah menganut konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini sesuai dengan peraturan UU No. 25 tahun 2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional. Dengan berlakunya UU No.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yaitu dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan penuh bagi masing-masing daerah, baik ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri dengan sedikit intervensi dari pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pembangunan lebih berhasil dan dapat memberikan serta dapat meningkatkan salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia. (Afrizal Yulianti:2018)

Dimana pelaksanaan otonomi daerah yang menitik beratkan pada suatu daerah yang ditandai adanya penyerahan sejumlah wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan alokasi sumber daya potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut untuk di belanjakan kebutuhan-kebutuhan yang sedang dibutuhkan di daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Potensi daerah yang dimiliki suatu daerah dapat memberikan penerimaan daerah atau biasa yang disebut pendapatan asli daerah (PAD) agar dapat mengurangi subsidi dari pemerintah pusat. Bahkan di daerah yang belum dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki secara penuh maka pemerintah pusat akan memberikan transfer yang berupa dana perimbangan contohnya seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus bertujuan sebagai pemerataan daerah untuk daerah dapat mengembangkan potensinya yang dimiliki daerahnya agar dimasa yang akan datang daerah tersebut tidak selalu bergantung transferan dari pemerintah pusat. (Abdurahman Wahid :2002)

Selanjutnya disajikan laporan realisasi PAD, DAU, dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi di Indonesia pada tahun 2012- 2017.

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan PAD, DAU dan Belanja Daerah Pemerintah**  
**Provinsi di Indonesia Tahun 2012 – 2017 (Ribuan Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>Belanja Daerah</b>
<b>2012</b>	<b>86.511.912.915</b>	<b>27.450.250.954</b>	<b>178.715.879.759</b>
<b>2013</b>	<b>101.596.400.437</b>	<b>31.111.914.255</b>	<b>203.838.322.929</b>
<b>2014</b>	<b>121.453.818.017</b>	<b>34.122.022.565</b>	<b>220.092.080.215</b>
<b>2015</b>	<b>127.497.344.793</b>	<b>35.208.784.853</b>	<b>247.680.577.777</b>
<b>2016</b>	<b>133.179.011.317</b>	<b>46.189.384.022</b>	<b>264.098.451.582</b>
<b>2017</b>	<b>149.307.806.874</b>	<b>54.911.086.018</b>	<b>307.039.123.460</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (Publikasi)

Dari Tabel 1.2 tersebut dapat dilihat penerimaan pemerintah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi Umum (DAU) dan pengeluaran pemerintah dari Belanja daerah Provinsi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2012-2017. Dimana belanja daerah yang mengalami peningkatan dari tahun 2012-2017 hal tersebut terjadi karena penerimaan pemerintah yang berupa PAD dan DAU yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. PAD dimana yang terendah yaitu pada tahun 2012 sebesar Rp. 86.511.912.951,00 dan yang tertinggi pada tahun 2017 Rp. 149.307.806.874,00 kemudian pada DAU yang paling terendah yaitu juga di tahun 2012 hanya sebesar Rp. 27.450.250.954,00 di bandingkan dengan tahun 2017 yang lebih besar lagi yaitu sebesar 54.911.086.018,00. Seiring dimana PAD dan DAU meningkat maka Belanja Daerah pun juga ikut meningkat yaitu dimana setiap tahunnya meningkat pada tahun 2012 sebesar Rp. 178.715.879.759,00 kemudian ditahun tahun selanjutnya juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 yang tertinggi yaitu sebesar Rp. 307.039.123.460,00.

Penerimaan daerah dan dana pengalokasian sebagai penopang belanja daerah dan belanja rutin sebagai penopang kesejahteraan masyarakat oleh karena itu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia saling timbal balik artinya jika ada pertumbuhan ekonomi maka akan mempengaruhi pembangunan manusia. Berdasarkan latar belakang masalah dengan melihat penerimaan daerah, dana pengalokasian umum dan belanja daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia maka akan dilakukan penelitian dengan judul “ANALISIS DANA ALOKASI UMUM (DAU), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2012–2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih luasnya perlu dilakukan perumusan masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017?
2. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017?
3. Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Indonesia tahun 2012-2017?

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah dan tujuan penelitian mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan kepada dinas terkait sebagai pengambilan kebijakan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan peningkatan kualitas pembangunan manusia untuk kemajuan daerah.
2. Memberikan wawasan dan pengetahuan yang dapat dilihat dari dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja daerah dalam pengambilan kebijakan. Serta bahan literatur tambahan bagi peneliti selanjutnya.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang berupa data panel dengan periode tahun 2012–2017 (*time series*) dan terdiri dari 34

Provinsi di Indonesia (*cros section*). Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa data publikasi Laporan Statistik Sosial meliputi Indeks Pembangunan Manusia dan Laporan Statistik Keuangan yang meliputi Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah.

## 2. Alat dan Model Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan dari data *cross section* dan *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan pada beberapa obyek dalam satu waktu sedangkan data *time series* data yang dikumpulkan pada satu objek dengan beberapa periode waktu.

Model ekonometrik yang digunakan dalam penelitian ini, dimodifikasi dari jurnal jurnal Setyowati, Lilis dan YohanaSuparwati (2012) *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Interviring (Studi kasus pada Pemerintahan Kabupaten dan Kota seJawa Tengah)* yaitu sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 \log DAU_{it} + \beta_2 \log PAD_{it} + \beta_3 \log BD_{it} + e_{it}$$

di mana :

$Y$  = Indeks Pembangunan Manusia

$\beta_0$ =Konstanta/*Intesept*

$\log DAU$  = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

$\log PAD$ = Koefisien regreai Pendapatan Asli Daerah(PAD)

$\log BD$ = Koefisien regresi Belanja Daerah (BD)

$i$  = data *cross section*

$t$  = data *time series*

$i \times t$  = banyaknya data panel

$e$  = *error term*

Estimasi model ekonometrika data panel diatas meliputi beberapa langkahyaitu sebagai berikut:

1. Mengestimasi model data panel PLS (*Partial Least Square*), FEM (*Fixed Effect Model*), dan REM (*Random Effect Model*).

2. Uji pemilihan model data panel:

a. *Uji Chow*

*Uji Chow* merupakan uji pengujian yang digunakan untuk memilih model data panel antara model PLS dengan model FEM. Hipotesis yang dilakukan yaitu:

$H_0$  : model menggunakan *Common Effect*/PLS

$H_a$  : model menggunakan *Fixed Effect*/ FEM

b. *Uji Hausman*

*Uji Hausman* merupakan pengujian yang digunakan akan untuk memilih model data panel antara REM dengan FEM. Hipotesis yang dilakukan yaitu :

$H_0$  : model menggunakan *Random Effect*/REM

$H_a$  : model menggunakan *Fixed Effect*/ FEM

3. Uji Validitas Pengaruh (Uji  $t$ ) merupakan pengujian untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.



4. Uji Eksistensi Model (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terkait.
5. Interpretasi R-Square ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.
6. Semua pengujian tersebut dilakukan dengan cara *time series* dan *crossection*.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I                      PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penerimaan dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II                      LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, teori yang digunakan antara lain teori indeks pembangunan manusia, teori penerimaan pemerintah, teori pengeluaran pemerintah, selain teori juga disajikan beberapa penelitian terdahulu, kerangka pikir dan hipotesis sebagai acuan dalam penelitian ini.

**BAB III                    METODELOGI PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang variabel-variabel, definisi operasional, jenis data, dan metode analisis yang digunakan penelitian.

**BAB IV                    HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas tentang hasil deskripsi data penelitian, hasil analisis, dan interpretasi ekonomi.

**BAB V                    PENUTUP**

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**